

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Aturkian Laia, H. F. (2024). *Rekontruksi Peran Kejaksaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Penyitaan dan Perampasan Aset*. Jawa Barat: CV. Jejak.
- Arifin, Z. (2024). *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi Dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum Dan Praktik)*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Arif, M. I. (2022). *Pertanggungjawaban Atas Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi, Perdata/Bisnis Dan Pidana/Korupsi*. Jakarta Pusat: Mekar Cipta Lestari
- Chazawi, A. (2018). *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Depok : Rajawali Pers
- Darul, Dessy. (2016). *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djarmiko, W. P. (2020). *Politik Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Budaya Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Efendi, Johnny. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris edisi kedua*. Jakarta: KENCANA.
- Evi Hartanti, S. (2023). *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hikmawati, Shanti, dkk. (2021). *Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Aset Tindak Pidana*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Iswara, I. M. (2023). *Suatu Pengantar Intelijen Sebagai Pelaksana Fungsi Intelijen Penegakan Hukum*. Jawa Barat: CV. Adanu Adimata.
- Mahmud, A. (2020). *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mario, J. (2020). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* . Yogyakarta: deepublish.
- Nelson, F. M. (2019). *Plea Bargaining dan Differed Prescution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi* . Jakarta Timur: Sinar Grafika.

- Panggabean. (2020). *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori - Praktik Dan Yurisprudensi Di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Popular.
- Parningotan Malau, H. P. (2024). *Analisis Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Uang Pengganti Atas Kasus Korupsi*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Rudi Margono, I. A. (2024). *Reformulasi Pidana Tambahan Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Mekar Cipta Lestari.
- Rodliyah, Salim. (2017). *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*. PT Rajagrafindo Persada.
- Rohim, N. (2021). *Cita Hukum Politik Negara*. Tangsel: Pascal Books.
- Santoso, P. I. (2022). *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualitas*. PT. Alumni Penerbit Akademik.
- Waluyo, B. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wisnu Murtopo, R. S. (2023). *Problematika Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jawa Barat: CV. Adanu Abitama.
- Yunus, S. F. (2024). *Pendidikan Antikorupsi*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata.
- Yusni, M. (2019). *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Airlangga Universty Press.
- Zaidan, A. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

ARTIKEL DALAM JURNAL

- Baharuddin, Siswandi. (2020). *Efektivitas Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*. *Journal Of Lex Theory (LJT)*, Volume 1, No. 2, (hlm.215).
- Fontian Munzil, I. R. (2016). *Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 22*, (hlm. 26).
- Heri, Tofik. (2021). *Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi*. *Mizan : Journal Of Islamic Law*, Volume 5 No. 2 , (hlm.275).
- Herman. (2018). *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. *Volume 2 Issue 1*, (hlm.310).

- Hutabarat, Suci, dkk. (2022). *Hukum dan Keadilan . Nusantara Hasana Journal*, (hlm.77).
- Intan Munirah, M. D. (2017). *Pembayaran Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19, No. 2*, (hlm. 354).
- Jaya, A. M. (2017). *Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Volume 1 Nomor 1, Jurnal FH Unila*, (hlm. 21-22).
- Mangheskhar, Saleh. (2024). *Perampasan Aset Terpidana Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pemulihan Keuangan Negara. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)*, (hlm.763).
- Nazamuddin, Nur, & Yulia. (2022). *Penuntutan Perampasan Harta Benda Terdakwa Korupsi Yang Diduga Berasal Dari Hasil Korupsi . Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, (hlm.10).
- Putra, Y. A. (2023). *Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. Volume 21 Nomor 3*,(hlm.335).
- Pratama, A. S. (2020). *Eksistensi Peranan Jaksa Dalam Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti. Corruptio: Volume 01 Issue 2*, (hlm. 85-87).
- Puteri Kencana Surya Erlangga, M. F. (2023). *Efektifitas Peran Kejaksanaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Korupsi Melalui Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Jurisdictie Vol 5 No 2*, (hlm. 140-141).
- Rinaldy, Maroni, dkk. (2021). *Urgensi Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemulihan Keuangan Negara*. (hlm.12).
- Serikat, Sabrielle. (2017). *Praktik Penelusuran Aset (Aset Tracing) Hasil Kejahatan Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang. Diponegoro Law Journal*, (hlm.9-11).
- Suhariyanto, B. (2018). *Penerapan Pidana Uang Pengganti Kepada Korporasi Dalam Perkara Korupsi Demi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara. Jurnal RechtsVinding*, (hlm.114).
- Sundhana, H. (2020). *Upaya Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Eksekusi Putusan Pidana Tambahan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi . UNES LAW REVIEW*, (hlm.260).
- Widyaiswara, M. F. (2020). *Penelusuran Aset (Asset Tracing) dan Pemulihan Kerugian Negara (Loss Recovery)*. BPKP, (hlm.1).

Yumenty, D. (2023). *Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, (hlm.64-66).

Yohanes, Danil, & Mulyati. (2023). *Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaanya*. UNES LAW REVIEW, (hlm.3822).

Yulia, Prakarsa. (2017). *Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum PRIORIS, (hlm.32).

ARTIKEL DALAM INTERNET

Candela, E. (2024, Juli 22). *Peran dan Jenis Jaksa dalam Sistem Hukum Indonesia*. Tersedia pada https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/686781/peran-dan-jenis-jaksa-dalam-sistem-hukum-indonesia#google_vignette (diakses tanggal 21 November 2024)

Hadi, S. (2021). *Pengelolaan Barang Rampasan dan Pemulihan Aset Tindak Pidana*. Tersedia pada https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca_artikel/14505/Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana.html (diakses tanggal 10 September 2024)

Kabupaten Buleleng. (2024, Agustus 23). Tersedia pada Wikipedia Ensiklopedia Bebas: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Buleleng (diakses tanggal 21 November 2024)

Pujianti, S. (2023). *Kewenangan Kejaksaan Lakukan Penyidikan Tipikor Sebagai Perlawanan Terhadap Kejahatan Luar Biasa*. Tersedia pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia : <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19551> (diakses tanggal 10 September 2024)

Purnama, S. (2021). *Pengelolaan Barang Rampasan dan Pemulihan Aset Tindak Pidana*. Tersedia pada KemenkeuKPKNL: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca_artikel/14505/Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana.html (diakses tanggal 12 September 2024)

Redjo, A. (2019). *Penelusuran Aset dan Pemulihan Kerugian* Tersedia pada <https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/konten/show/1028> (diakses tanggal 12 September 2024)

Tugas Jaksa di Indonesia Sesuai dengan Perannya Masing-masing. (2023, November 22). Tersedia pada <https://kumparan.com/berita-hari-ini/tugas-jaksa-di-indonesia-sesuai-dengan-perannya-masing-masing-21UgeFJUNle/full> (diakses tanggal 21 November 2024)

Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Buleleng. (n.d.). Tersedia pada <https://kejari-buleleng.kejaksaan.go.id/> (diakses tanggal 21 November 2024)

KARYA TULIS ILMIAH

Akbar, I. (2021). *Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Aset Negara (Asset Recovery) Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Pariaman.* (Tesis). Universitas Andalas.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150)

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/
10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1571)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65)